



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 795/ 28 /BUP-LK/II/2023**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

**KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 2 Februari 2023



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 795/28 /BUP-LK/II/2023

TANGGAL : 2 Februari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN		KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	DENGAN KEGIATAN	
1	Wiradinata F, S.STP NIP. 19831027 200212 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	- Penataan Administrasi Pemerintahan	- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah
			- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	
			- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		
2	Eri Fortuna, SH NIP. 19660104 199303 1 006	Kepala Bagian Hukum	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah
			- Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		
3	Deki Yusman, S.STP NIP. 19771217 199703 1 002	Kepala Bagian Organisasi	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
			- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
4	Ir. Ice Yuliarni NIP. 19611016 199003 1 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah
			- Pengelolaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan		
5	Davi, S.Sos, M.Si NIP. 19700716 199202 1 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekretariat Daerah
			- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
6	Dra. Lina Medona, MM NIP. 19690515 199308 2 001	Kabag Bagian Perencanaan dan Keuangan	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat Daerah
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			- Penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis Realisasi Anggaran	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- penyediaan Dana penunjang Operasional kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	
7	Iyza Angraini, ST, M. Si NIP. 19741228 199903 2 004	Kepala bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah
			- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan		

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN		KETERANGAN	
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	DENGAN KEGIATAN		
					- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
8	H. Usman, S.Pd, M.M.Pd NIP. 19650504 198506 1 001	Kabag Kesehatan Rakyat			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
9	Irwandi, S.Sos, MM NIP. 19731213 199403 1 004	Kepala Bagian Umum			- Pengadaan Pakiaian Dinas beserta atribut kelengkapannya KDH dan WKDH - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
10	Ronny M. Nur, S.Sos ME NIP. 19731213 199403 1 004	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			- Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah
11	Fahmi Ridho, MZ, SKM NIP. 19690802 199203 1 008	Kepala UPTD Puskesmas Suliki			- Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
12	drg. Melita Wise Utami NIP. 19750513 200502 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Mungo			- Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Depi Peringgi, SKM NIP. 19740928 199403 1 002	Kepala UPTD Puskesmas Pangkalan			- Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN		KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	DENGAN KEGIATAN	
14	dr. Febrandi NIP. 19810217 201101 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Pati	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
15	dr. Silvia Rosja NIP. 19840409 201407 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Situjuh	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
16	Neldawati, SKM NIP. 19680201 198810 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Piladang	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
17	Ns. Masril, S.Kep NIP. 19740605 199303 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Batu Hampar	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
18	Tri Mujianti, S.ST NIP. 19660421 199003 2 005	Kepala UPTD Puskesmas Taram	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Ermalifa Nora, S.Tr.Keb NIP. 19731104 200212 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Halaban	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Lely Ekarita, S.ST NIP. 19730116 199303 2 004	Kepala UPTD Puskesmas Dangung-Dangung	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
21	dr. Ratni NIP. 19701017 201001 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggung	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	drg. Yone Akdes NIP. 19780704 200901 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Padang Kandis	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	Yulida, SP NIP. 19670930 198803 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Mungka	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
24	dr. Hadi Oktafano NIP. 19921024 201902 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Maek	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
25	Ns. Rensiner Dami, S.Kep, MA NIP. 19690707 198912 1 004	Kepala UPTD Puskesmas Koto Tinggi	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
26	Dewi Ertzandi, S.ST NIP. 19771217 200604 2 007	Kepala UPTD Puskesmas Banja Loweh	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
27	Ns. Joni Masda, S.Kep NIP. 19750617 199503 1 005	Kepala UPTD Puskesmas Baruh Gunung	-	Pengikatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	dr. Putri Nilam Sari Nazir	Kepala UPTD Puskesmas	-	Pengikatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN KEGIATAN	
	NIP. 19880715 201902 2 003	Muaro Paati	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
29	Tuti Dwi Putri, S.Kep NIP. 19791003 200604 2 016	Kepala UPTD Puskesmas Rimbo Data	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
30	Imrizal, SKM NIP. 19690917 199001 1 001	Kepala Puskesmas Gunuang Malintang	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
31	Parti Yasmi, S.ST NIP. 19710710 199012 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Pakan Rabaa	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
32	dr. Meidya Mukarramah NIP. 19940504 201902 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Sialang	- Penigkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Ditandatangani  
pada tanggal 2 Februari  
2023

**SAFARUDDIN DINI BAMPARO RAJO**



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LIMAU  
SUMATERA UTARA